

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang berada di Indonesia yang terdaftar di Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI). PDAM merupakan badan usaha milik daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum. Jumlah Perusahaan Air Minum di Indonesia yang terdaftar di PERPAMSI adalah 391 Perusahaan Air Minum, sedangkan PDAM yang kinerjanya di evaluasi oleh Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) adalah 378 PDAM.

PDAM dibagi menjadi 4 (empat) kelompok sesuai dengan wilayahnya, yaitu: Wilayah I (Pulau Sumatera) berjumlah 104 PDAM, Wilayah II (Pulau Jawa) berjumlah 108 PDAM, Wilayah III (Pulau Kalimantan dan Sulawesi) berjumlah 115 PDAM, dan Wilayah IV (Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) berjumlah 51 PDAM. Dari hasil penilaian kinerja PDAM tahun 2017 yang dievaluasi oleh BPPSPAM, sebanyak 209 PDAM berkinerja sehat dengan persentase sebesar 55,3%, PDAM berkinerja kurang sehat sebanyak 103 PDAM dengan persentase sebesar 27,2%, sedangkan PDAM berkinerja sakit sebanyak 66 PDAM dengan persentase sebesar 17,5%.

PDAM yang tidak mengalami kerugian selama tahun 2014 – 2016 adalah sebanyak 120 PDAM, dengan rincian: wilayah I sebanyak 10 PDAM, wilayah II sebanyak 77 PDAM, wilayah III sebanyak 14 PDAM, dan wilayah IV sebanyak 19 PDAM. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan di dapatlah 114 PDAM (terlampir) yang dijadikan sampel dalam penelitian ini.

4.1.2 Hasil Analisis Deskriptif

Sebelum dilakukan analisis mengenai pengaruh variabel independen, variabel dependen, dan variabel intervening, terlebih dahulu dilakukan analisis deskriptif data variabel penelitian. Analisis deskriptif memberikan penjelasan mengenai rata-rata, nilai maksimum, dan nilai minimum dari masing-masing variabel independen

maupun variabel dependen. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari LHP LKPD tahun 2014 – 2016 Kabupaten/Kota di Indonesia yang diperoleh dari BPK RI dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM 2017 yang diperoleh dari *website* BPPSPAM.

Variabel dalam penelitian ini adalah penyertaan modal pemerintah daerah sebagai variabel independen, profitabilitas sebagai variabel dependen, dan kinerja pelayanan sebagai variabel intervening. Analisis deskriptif dari kedua variabel tersebut dijabarkan dalam sub-bab berikut:

4.1.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah diartikan sebagai investasi permanen yaitu investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak untuk ditarik kembali, untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Halim, hlm. 208). Penyertaan modal pemerintah daerah ini diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah terhadap PDAM yang terdapat di LHP LKPD.

Berikut adalah penyertaan modal pemerintah daerah terhadap PDAM pada beberapa kabupaten/kota di Indonesia yang dijadikan sampel dalam penelitian ini selama tahun 2014 – 2016:

Tabel 4.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2014 - 2016

No	Penyertaan Modal Pemda kepada PDAM			
	Tahun	Rata-rata	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
1	2014	58.977.988.436,76	1.087.863.850.764,00	676.037.296,58
2	2015	69.427.904.131,06	1.123.352.360.102,00	866.629.183,50
3	2016	88.460.547.080,37	1.099.529.503.215,00	2.255.386.610,27

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa dari 114 PDAM yang dijadikan sampel terdapat 80 PDAM yang mengalami peningkatan penyertaan modal selama tahun 2014 – 2016, yaitu:

Tabel 4.2 80 PDAM yang mengalami peningkatan penyertaan modal selama tahun 2014 – 2016

No	PDAM	No	PDAM
1	Kabupaten Bireuen	41	Kabupaten Boyolali
2	Provinsi Sumatera Utara	42	Kota Magelang
3	Kota Payakumbuh	43	Kabupaten Kebumen
4	Kota Palembang	44	Kabupaten Semarang
5	Kabupaten Lampung Barat	45	Kabupaten Bantul
6	Kota Tangerang	46	Kabupaten Sleman
7	Kota Cilegon	47	Kota Yogyakarta
8	Kabupaten Tangerang	48	Kota Madiun
9	Kabupaten Pandeglang	49	Kabupaten Madiun
10	Kabupaten Serang	50	Kabupaten Magetan
11	Kota Cirebon	51	Kabupaten Banyuwangi
12	Kota Bogor	52	Kota Malang
13	Kabupaten Garut	53	Kabupaten Jember
14	Kabupaten Subang	54	Kabupaten Situbondo
15	Kabupaten Bekasi	55	Kabupaten Gresik
16	Kabupaten Indramayu	56	Kabupaten Tuban
17	Kabupaten Bogor	57	Kota Batu
18	Kota Bekasi	58	Kabupaten Bojonegoro
19	Kabupaten Ciamis	59	Kabupaten Pamekasan
20	Kabupaten Cianjur	60	Kabupaten Bondowoso
21	Kabupaten Sukabumi	61	Kota Singkawang
22	Kabupaten Kuningan	62	Kota Pontianak
23	Kabupaten Sumedang	63	Kota Banjarmasin
24	Kota Sukabumi	64	Kabupaten Banjarmasin
25	Kabupaten Cilacap	65	Kabupaten Majene
26	Kota Salatiga	66	Kabupaten Bantaeng
27	Kabupaten Batang	67	Kota Palopo
28	Kabupaten Magelang	68	Kota Makassar
29	Kabupaten Pemasang	69	Kabupaten Luwu Utara
30	Kabupaten Temanggung	70	Kabupaten Buleleng
31	Kabupaten Tegal	71	Kabupaten Gianyar
32	Kabupaten Jepara	72	Kota Denpasar
33	Kabupaten Sragen	73	Kota Mataram
34	Kabupaten Karanganyar	74	Kabupaten Lombok Tengah
35	Kabupaten Banyumas	75	Kabupaten Lombok Utara
36	Kabupaten Purworejo	76	Kota Kupang
37	Kabupaten Sukoharjo	77	Kabupaten Lembata
38	Kabupaten Brebes	78	Kabupaten Maluku Tenggara Barat
39	Kabupaten Purbalingga	79	Kabupaten Kepulauan Aru
40	Kabupaten Demak	80	Kabupaten Yapen

Sumber: BPK RI (diolah)

Berdasarkan hasil statistik deskriptif variabel penyertaan modal pemerintah daerah, diketahui bahwa rata-rata (*mean*) penyertaan modal pemerintah daerah mengalami peningkatan selama tahun 2014 - 2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai buku penyertaan modal pemerintah daerah terhadap PDAM di Indonesia terus meningkat. Peningkatan tersebut dapat terjadi baik karena

Indah Rachmasari Kurniawan, 2018

**PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN KINERJA PELAYANAN
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penambahan modal setiap tahunnya maupun dari bagian laba PDAM yang dapat menambah nilai buku penyertaan modal pemerintah daerah terhadap PDAM.

Nilai maksimum penyertaan modal pemerintah daerah terhadap PDAM mengalami fluktuatif dari tahun 2014-2016. Selama 3 tahun berturut-turut terdapat pada Kota Surabaya yang tertinggi sebesar Rp 1.087.863.850.764,00 pada tahun 2014, Rp 1.123.352.360.102,00 pada tahun 2015, dan sebesar Rp 1.099.529.503.215,00 pada tahun 2016. Pemerintah Kota Surabaya melakukan penyertaan modal terhadap PDAM lebih besar dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya dalam menyertakan modal pada PDAM yang dimilikinya, ini terjadi karena bagian laba yang diperoleh dari PDAM Kota Surabaya selalu tinggi sehingga nilai buku penyertaan modal pemerintah daerahnya pun semakin tinggi.

Sedangkan nilai minimum penyertaan modal pemerintah daerah terhadap PDAM di tahun 2014 terdapat pada pada Kabupaten Bantaeng sebesar Rp 676.037.296, 58, dan di tahun 2015 dan 2016 terdapat pada Kabupaten Sampang sebesar Rp 866.629.183,50 dan Rp 2.255.386.610, 27. Rendahnya nilai buku penyertaan modal pemerintah daerah terhadap PDAM ini disebabkan oleh rendahnya penambahan modal maupun bagian laba yang diperoleh dari PDAM masing-masing kabupaten/kota.

4.1.2.2 Kinerja Pelayanan

Pada penelitian ini kinerja pelayanan PDAM diukur dengan menjumlahkan skor dari beberapa parameter yang menjadi alat ukur kinerja PDAM dalam aspek pelayanan. Berikut merupakan total skor kinerja pelayanan dari beberapa parameter yang diraih oleh PDAM di Indonesia yang dijadikan sampel dalam penelitian ini selama tahun 2014 – 2016:

Tabel 4.3 Total Skor Kinerja Pelayanan PDAM

No	Skor Kinerja Pelayanan			
	Tahun	Rata-rata	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
1	2014	0,85	1,20	0,45
2	2015	0,83	1,20	0,40
3	2016	0,83	1,25	0,40

Indah Rachmasari Kurniawan, 2018

PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN KINERJA PELAYANAN
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Sumber: BPPSPAM (diolah)

Berdasarkan tabel 4.3, terlihat bahwa kinerja pelayanan pada PDAM di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini secara rata-rata mengalami penurunan pada tahun 2014 ke 2015 dan tetap pada tahun 2016. Skor kinerja pelayanan tertinggi dicapai oleh PDAM Kota Cirebon pada tahun 2014 sebesar 1,20, pada tahun 2015 dicapai oleh PDAM Tirta Musi Kota Palembang sebesar 1,20, dan pelayanan tertinggi pada tahun 2016 dicapai oleh PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga sebesar 1,25. Sedangkan skor kinerja pelayanan terendah pada tahun 2014 dicapai oleh PDAM Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman sebesar 0,45, PDAM Kabupaten Majene sebesar 0,40 pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 skor kinerja pelayanan terendah dicapai oleh PDAM Kabupaten Majene dan Kabupaten Dompu sebesar 0,40. Total skor kinerja pelayanan menunjukkan bahwa kinerja pelayanan PDAM mengalami penurunan selama tahun 2014 – 2016.

Penurunan skor kinerja pelayanan selama tahun 2014 – 2016 disebabkan oleh indikator atau parameter yang diukur dalam kinerja pelayanan tidak sepenuhnya mengalami kenaikan. Hanya 2 dari 5 parameter dalam kinerja pelayanan yang mengalami peningkatan selama tahun 2014 – 2015, yaitu Cakupan Pelayanan dan Kualitas Air Pelanggan. Sedangkan 3 diantaranya yaitu: Pertumbuhan Pelanggan, Tingkat Penyelesaian Pengaduan, serta Konsumsi Air Domestik mengalami fluktuatif.

Dari beberapa indikator kinerja pelayanan PDAM selama tahun 2014 – 2016, PDAM berhasil meningkatkan prosentase perbandingan jumlah penduduk yang terlayani oleh PDAM dengan jumlah penduduk di wilayah pelayanan, dan PDAM juga mampu menangani keluhan pelanggan dengan baik selama tahun 2014 – 2016. Tetapi, dalam kaitannya dengan pertumbuhan pelanggan, PDAM belum berhasil mempertahankan peningkatan jumlah pelanggan dalam 1 tahun. Selain itu, PDAM belum mampu menangani keluhan pelanggan dengan maksimal hal tersebut dapat dilihat dengan menurunnya skor tingkat penyelesaian pengaduan pada tahun 2015, dan tingkat konsumsi pelanggan rumah tangga terhadap air PDAM perbulannya mengalami penurunan pada tahun 2016.

Total skor kinerja pelayanan di atas merupakan jumlah dari 5 (lima) parameter yang digunakan dalam penelitian ini untuk melakukan pengukuran kinerja pelayanan, sebagai berikut:

Tabel 4.4 Kinerja Pelayanan PDAM di Indonesia Tahun 2014 - 2016

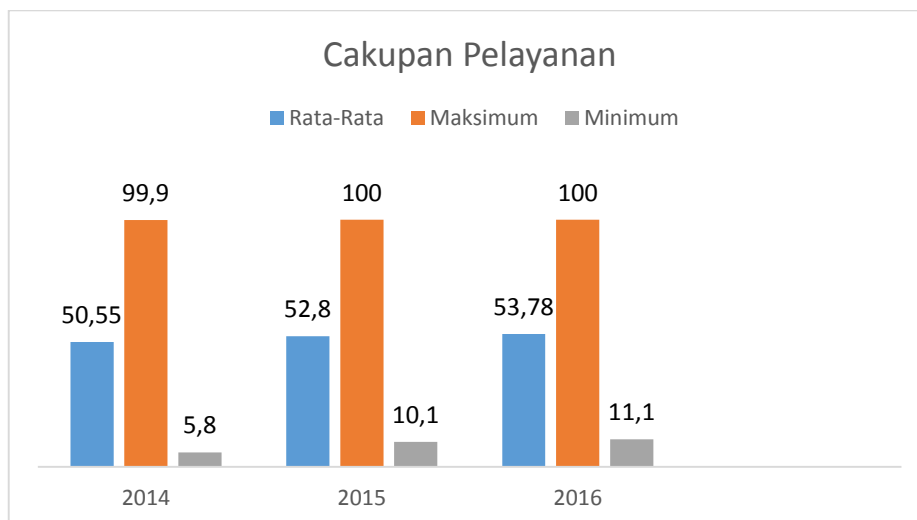
No		Kinerja Pelayanan					
		Tahun	Cakupan Pelayanan Teknis	Pertumbuhan Pelanggan	Tingkat Penyelesaian Pengaduan	Kualitas Air Pelanggan	Konsumsi Air Domestik
1	Rata-rata	2014	50,6	8,6	111,3	70,8	16,6
		2015	52,8	9,1	94,8	72,2	17,1
		2016	53,8	5,8	95,7	72,2	16,8
2	Nilai Maksimum	2014	99,9	94,3	2000	108,1	33,5
		2015	100	167,9	100	375	33,4
		2016	100	40	101,8	100	33,6
3	Nilai Minimum	2015	5,8	-11,2	12,9	0	0
		2016	10,1	-22,1	23,5	0	8,7
		2017	11,1	-30,2	0	0	1,2
RATA-RATA			52,4	7,8	100,6	71,7	16,8
NILAI MAKSIMUM			100	167,9	2000	375	33,6
NILAI MINIMUM			5,8	-30,2	0	0	0

Sumber: BPPSPAM (diolah)

a) Cakupan pelayanan

Cakupan pelayanan dalam penelitian ini dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk terlayani dengan jumlah penduduk wilayah pelayanan. Semakin tinggi cakupan pelayanan teknis maka semakin baik kinerja PDAM. Cakupan pelayanan teknis PDAM di atas secara rata-rata, yaitu dengan raihan sekitar 50%-an selama tahun 2014-2016 menunjukkan bahwa manajemen PDAM cukup mampu melakukan pelayanan air terhadap wilayah pelayanan teknisnya, namun harus terus ditingkatkan mengingat target RPJMN 2019 pemerintah pusat terkait 100% akses aman air minum.

Berikut merupakan cakupan pelayanan yang dicapai oleh PDAM di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini selama tahun 2014 – 2016:



Sumber: BPPSPAM (diolah)

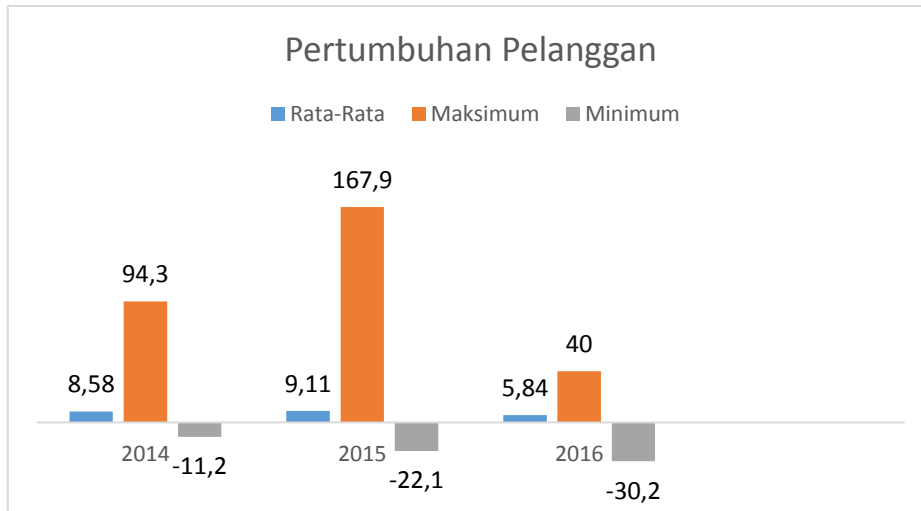
Grafik 4.1 Cakupan Pelayanan

Berdasarkan tabel dan grafik 4.1, terlihat bahwa cakupan pelayanan pada PDAM di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini secara rata-rata mengalami peningkatan selama tahun 2014 – 2016. Rata-rata cakupan pelayanan pada tahun 2014 sebesar 50,55%, pada tahun 2015 sebesar 52,8% dan pada tahun 2016 sebesar 53,78%. Cakupan pelayanan tertinggi selama 3 tahun dicapai oleh PDAM Bandarmasih Kota Banjarmasin sebesar 99,9%, 100%, dan 100%. Sedangkan cakupan pelayanan terendah pada tahun 2014 dicapai oleh PDAM Kabupaten Luwu Utara sebesar 5,8%, dan pada tahun 2015 - 2016 dicapai oleh PDAM Kabupaten Brebes sebesar 10,1% dan 11,1%.

b) Pertumbuhan Pelanggan

Pertumbuhan pelanggan pada penelitian ini dihitung dengan membandingkan selisih jumlah pelanggan tahun ini dan jumlah pelanggan tahun lalu dengan jumlah pelanggan tahun lalu. Semakin tinggi pertumbuhan pelanggan maka semakin baik kinerja PDAM. Pertumbuhan pelanggan PDAM tersebut menggambarkan bahwa aktivitas PDAM dalam melakukan usaha dapat menambah jumlah pelanggannya.

Berikut merupakan pertumbuhan pelanggan PDAM di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian selama tahun 2014 – 2016:



Sumber: BPPSPAM (diolah)

Grafik 4. 2 Pertumbuhan Pelanggan

Berdasarkan grafik 4.2, terlihat bahwa pertumbuhan pelanggan pada PDAM di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini secara rata-rata mengalami fluktuatif selama tahun 2014-2016. Rata-rata pertumbuhan pelanggan pada tahun 2014 sebesar 8,58%, lalu meningkat pada tahun 2015 sebesar 9,11%, dan menurun cukup signifikan pada tahun 2016 menjadi 5,84%. Pertumbuhan pelanggan tertinggi pada tahun 2014 dicapai oleh PDAM Kabupaten Bandung sebesar 94,3%, pada tahun 2015 dicapai oleh PDAM Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang sebesar 167,9% dan PDAM Tirta Bening Lontar Kota Kupang sebesar 40% pada tahun 2016. Sedangkan pertumbuhan pelanggan terendah pada tahun 2014 dicapai oleh PDAM Tirta Alami Kabupaten Tanah sebesar -11,2%, pada tahun 2015 dicapai oleh PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor sebesar -22,1%, dan PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen pada tahun 2016 sebesar -30,2%.

Pertumbuhan pelanggan pada penelitian ini dihitung dengan membandingkan selisih jumlah pelanggan tahun ini dan jumlah pelanggan tahun lalu dengan jumlah pelanggan tahun lalu. Semakin tinggi pertumbuhan pelanggan maka semakin baik kinerja PDAM. Pertumbuhan pelanggan PDAM tersebut menggambarkan bahwa aktivitas PDAM dalam melakukan usaha dapat menambah jumlahnya. Pertumbuhan pelanggan PDAM yang ditunjukkan tabel di atas secara rata-rata mengalami fluktuatif. Pertumbuhan pelanggan sebesar 8,58% pada tahun 2014 dan mengalami kenaikan di tahun 2015 menjadi 9,11% menunjukkan bahwa

Indah Rachmasari Kurniawan, 2018

PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN KINERJA PELAYANAN
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

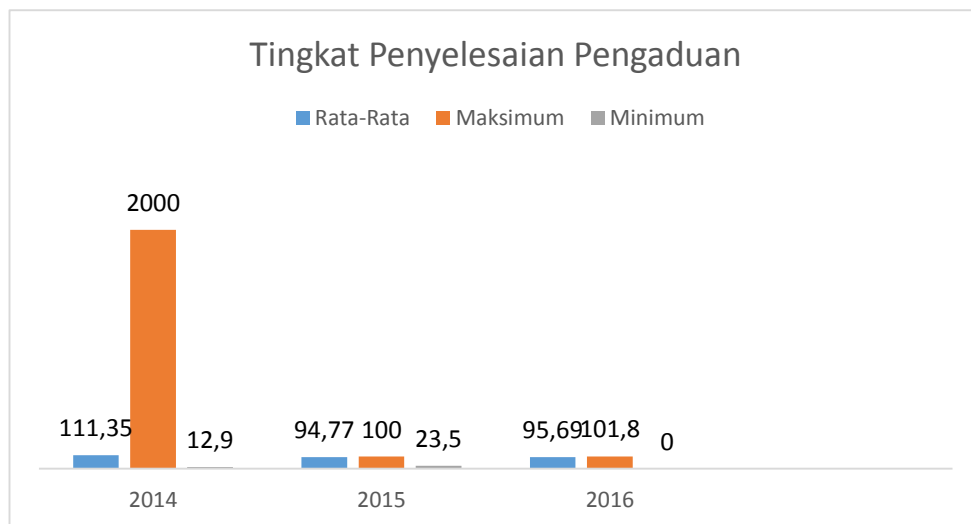
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pertumbuhan pelanggan sudah baik. Namun dengan menurunnya tren pertumbuhan pelanggan pada tahun 2016 sebesar 5,84% menunjukkan bahwa pertumbuhan pelanggan turun menjadi cukup baik. Berdasarkan hasil tersebut seharusnya PDAM memberikan perhatian serius sehingga tidak terjadi lagi penerunan pertumbuhan pelanggan pada tahun berikutnya.

c) Tingkat Penyelesaian Pengaduan

Tingkat penyelesaian pengaduan dalam penelitian ini dihitung dengan membandingkan jumlah keluhan selesai dengan jumlah keluhan. Semakin tinggi tingkat penyelesaian aduan maka semakin baik kinerja PDAM.

Berikut merupakan tingkat penyelesaian pengaduan pada PDAM di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini selama tahun 2014 – 2016:



Sumber: BPPSPAM (diolah)

Grafik 4.3 Tingkat Penyelesaian Pengaduan

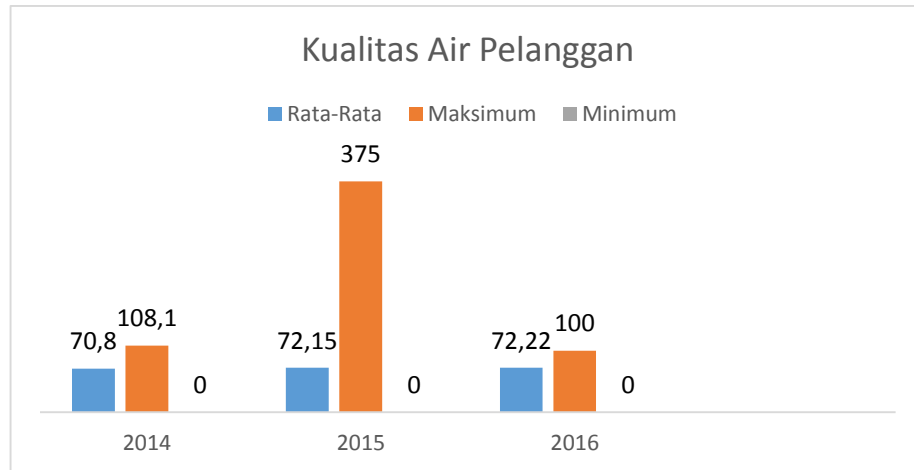
Berdasarkan grafik 4.3, terlihat bahwa tingkat penyelesaian pengaduan pada PDAM di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini secara rata-rata mengalami penurunan dan kenaikan selama tahun 2014-2016, dengan rata-rata penyelesaian pengaduan pada tahun 2014 sebesar 111,35%, pada tahun 2015 sebesar 94,77%, dan 95,69% pada tahun 2016. Tingkat penyelesaian pengaduan tertinggi dicapai pada tahun 2014 dicapai oleh PDAM Tirta Rangga Kabupaten Subang sebesar 2000,00%, lalu pada tahun 2015 dari 114 PDAM yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 68 PDAM mencapai 100% tingkat penyelesaian aduan,

dan nilai maksimum pada tahun 2016 sebesar 101,80% dicapai oleh PDAM Kota Pasuruan. Sedangkan tingkat penyelesaian aduan terendah pada tahun 2014 dicapai oleh PDAM Kabupaten Bantaeng sebesar 12,90%, PDAM Nusa Kenari Kabupaten Alor sebesar 23,50% pada tahun 2015, dan pada tahun 2016 dicapai oleh PDAM Kabupaten Dompu sebesar 0,00%

Tingkat penyelesaian pengaduan dalam penelitian ini dihitung dengan membandingkan jumlah keluhan selesai dengan jumlah keluhan. Semakin tinggi tingkat penyelesaian aduan maka semakin baik kinerja PDAM. Tingkat penyelesaian aduan PDAM selama tahun 2014 – 2016 yaitu dengan rata-rata sebesar 90% keatas menunjukkan bahwa manajemen PDAM mampu dengan sangat baik menyelesaikan masalah keluhan pelayanan air maupun lainnya yang berasal dari pelanggan dan atau bukan pelanggan. Namun, rata-rata tingkat penyelesaian aduan yang terus menurun harus segera mendapat perhatian serius dari pihak manajemen PDAM. Selain itu, pada kenyataannya di lapangan masih terdapat banyak keluhan terkait penyelesaian aduan pelanggan ini, sudah pada tahap wajib PDAM untuk membenahi kinerja terkait penyelesaian aduan pelanggan.

d) Kualitas Air Pelanggan

Kualitas air pelanggan dalam penelitian ini dihitung dengan membandingkan jumlah uji yang memenuhi syarat dengan jumlah yang diuji. Semakin tinggi kualitas air pelanggan maka semakin baik kinerja PDAM. Berikut merupakan kualitas air pelanggan PDAM di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini selama tahun 2014 – 2016:



Sumber: BPPSPAM (diolah)

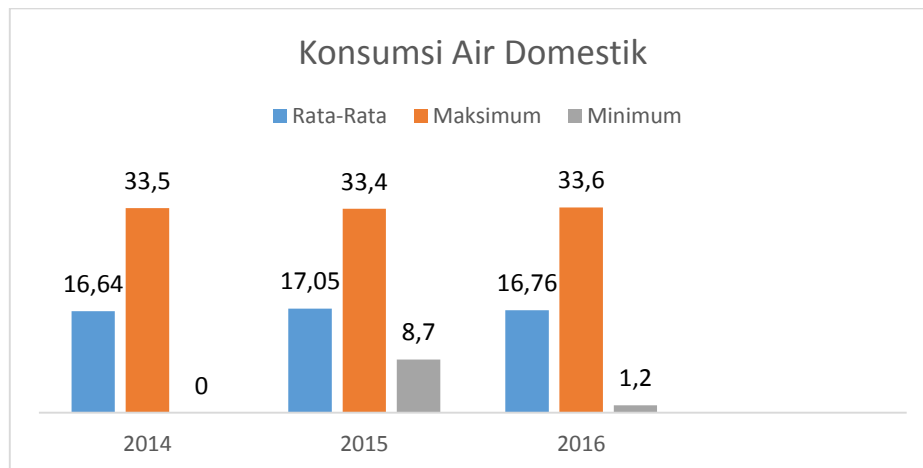
Grafik 4.4 Kualitas Air Pelanggan

Berdasarkan grafik 4.4, terlihat bahwa kualitas air pelanggan pada PDAM di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini secara rata-rata mengalami peningkatan selama tahun 2014-2016. Rata-rata pada tahun 2014 sebesar 70,80%, pada tahun 2015 sebesar 72,15% dan pada tahun 2016 sebesar 72,22%. PDAM yang mencapai kualitas air pelanggan tertinggi pada tahun 2014 adalah PDAM Kota Malang sebesar 108,10%, pada tahun 2015 dicapai oleh PDAM Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang sebesar 375,00%, sedangkan pada tahun 2016 sebanyak 22 PDAM dari 114 PDAM yang dijadikan sampel mencapai kualitas air pelanggan tertinggi dengan persentase 100%.

Kualitas air pelanggan dalam penelitian ini dihitung dengan membandingkan jumlah uji yang memenuhi syarat dengan jumlah yang diuji. Semakin tinggi kualitas air pelanggan maka semakin baik kinerja PDAM. Kualitas air pelanggan PDAM secara rata-rata di angka 70% selama tahun 2014 – 2016, hal tersebut menunjukkan bahwa PDAM telah mampu melayani pelanggannya dengan kualitas air yang baik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan baik dari segi Kuantitas, Kualitas, dan Kontinuitas atau yang sering disebut dengan 3K. Nilai rata-rata kualitas air pelanggan yang tinggi dan tren baik yang terjadi selama 2014 – 2016 harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan lagi oleh manajemen PDAM. Selain itu, masih banyak keluhan dari masyarakat terkait kualitas air pelanggan yang harus cepat di benahi oleh PDAM.

e) Konsumsi Air Domestik

Konsumsi air domestik dalam penelitian ini dihitung dengan membandingkan jumlah air yang terjual domestik per bulan dengan jumlah pelanggan domestik. Semakin tinggi konsumsi air domestik maka semakin baik kinerja PDAM. Berikut merupakan konsumsi air domestik yang dicapai oleh PDAM di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini selama tahun 2014 – 2016:



Sumber: BPPSPAM (diolah)

Grafik 4.5 Konsumsi Air Domestik

Berdasarkan grafik 4.5, terlihat bahwa konsumsi air domestik pada PDAM di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini secara rata-rata mengalami fluktuatif selama tahun 2014 – 2016. Rata-rata konsumsi air domestik pada tahun 2014 sebesar 16,64, pada tahun 2015 sebesar 17,05, dan pada tahun 2016 sebesar 16,76. Konsumsi air domestik tertinggi pada tahun 2014 dan 2015 dicapai oleh PDAM Tirta Nauli Kota Sibolga sebesar 33,50 dan 33,40, dan konsumsi air domestik tertinggi pada tahun 2016 dicapai oleh PDAM Kabupaten Kepulauan Yapen sebesar 33,60. Sedangkan konsumsi air domestik terendah pada tahun 2014 dicapai oleh PDAM Tirta Rangga sebesar 0,00, lalu pada tahun 2015 konsumsi air domestik terendah dicapai oleh PDAM Tirta Bening Lontar sebesar 8,70, dan yang memperoleh konsumsi air domestik terendah pada tahun 2016 adalah PDAM Tirta Raharja sebesar 1,20.

Konsumsi air domestik dalam penelitian ini dihitung dengan membandingkan jumlah air yang terjual domestik per bulan dengan jumlah pelanggan domestik.

Indah Rachmasari Kurniawan, 2018

PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN KINERJA PELAYANAN
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Semakin tinggi konsumsi air domestik maka semakin baik kinerja PDAM. Konsumsi air domestik selama tahun 2014-2016 dengan rata-rata raihan sebesar 16 m³/bln – 17 m³/bln menunjukkan bahwa jumlah air yang terjual domestik per bulan belum maksimal atau dikatakan masih rendah. Selain rendah, penurunan secara rata-rata konsumsi air domestik selama tahun 2015 – 2016 harus menjadi perhatian dalam perbaikan bagi manajemen PDAM dalam meningkatkan kinerja PDAM.

4.1.2.3 Profitabilitas

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return on Equity* (ROE). *Return on Equity* (ROE) didefinisikan sebagai suatu rasio untuk mengukur tingkat kemampuan memperoleh laba dari modal (ekuitas) yang ada. Semakin tinggi tingkat ROE maka semakin baik kemampuan PDAM dalam menciptakan keuntungan. Profitabilitas (ROE) yang dijadikan sampel selama tahun 2014 – 2016:

Tabel 4.5 Return on Equity (ROE)

No	<i>Return on Equity (ROE)</i>			
	Tahun	Rata-rata	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
1	2014	8,41	88,60	0,10
2	2015	7,50	72,80	0,20
3	2016	6,60	50,40	0,10

Sumber: BPPSPAM (diolah)

Berdasarkan tabel 4.5, terlihat bahwa ROE yang dicapai oleh PDAM di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini secara rata-rata mengalami penurunan dari tahun 2014-2016, dengan rata ROE pada tahun 2014 – 2016 sebesar 8,41, 7,50, dan 6,60. PDAM yang memperoleh nilai ROE tertinggi pada tahun 2014 dan 2015 adalah PDAM Kota Makassar sebesar 88,60 dan 72,80, dan pada tahun 2016 nilai ROE tertinggi diraih oleh PDAM Kota Wonosobo sebesar 50,40. Sedangkan untuk ROE terendah pada tahun 2014 diraih oleh PDAM Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Bondowoso dengan raihan sebesar 0,10, nilai ROE terendah pada tahun 2015 diraih oleh 3 PDAM yaitu PDAM Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bondowoso sebesar 0,20, sedangkan nilai ROE terendah pada tahun 2016 diraih oleh 3 PDAM yaitu PDAM Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Toli-toli, dan Kabupaten Lembata sebesar 0,13.

Indah Rachmasari Kurniawan, 2018

PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN KINERJA PELAYANAN
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

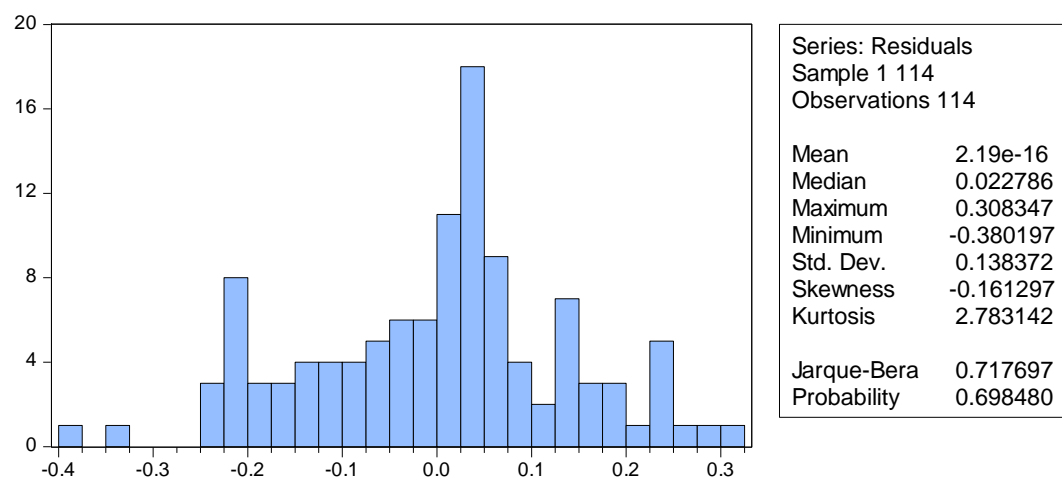
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Return on Equity (ROE) didefinisikan sebagai suatu rasio untuk mengukur tingkat kemampuan memperoleh laba dari modal (ekuitas) yang ada. Semakin tinggi tingkat ROE maka semakin baik kemampuan PDAM dalam menciptakan keuntungan. ROE yang dijelaskan di atas menunjukkan bahwa PDAM di Indonesia yang dijadikan sampel dalam penelitian ini masih belum baik karena tidak menunjukkan peningkatan ROE dari tahun 2014 – 2016. Ini berarti bahwa laba bersih yang dihasilkan PDAM masih belum signifikan dibandingkan dengan jumlah modal (ekuitas) nya, dan PDAM belum mampu meningkatkan tingkat pengembalian terhadap jumlah equity yang dilakukan oleh pemda. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektifitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya belum maksimal. Selain itu, penyebab PDAM merugi disebabkan oleh kinerja PDAM yang menurun dan waktu pembayaran yang dibatasi dari pukul 08.00 – 14.00.

4.1.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Hasil pengujian untuk membuktikan distribusi normal dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengolahan data untuk uji normalitas pada gambar 4.1 dengan menggunakan *Jarque-Bera Probability* diperoleh probability sebesar

Indah Rachmasari Kurniawan, 2018

PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN KINERJA PELAYANAN
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

0.698480. Hal ini menunjukkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal, karena $0,681702 > 0,05$ sehingga dapat dilanjutkan untuk melakukan *path analysis* dan uji hipotesis.

4.1.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians antar variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas yang dipakai pada penelitian ini yaitu Uji *Glejser*. Hasil pengujian untuk heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-16.923	10.118		-1.673	.097
	ln_pmpd	.788	.455	.177	1.733	.086
	KINERJAPELAYA	3.253	3.607	.092	.902	.369
	NAN					

a. Dependent Variable: resabs

Sumber: Hasil Output SPSS (2018)

Berdasarkan tabel 4.6, menunjukkan bahwa variabel yang diuji dengan metode *glejser* tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikansi setiap variabel yang lebih dari 0,05. Variabel penyertaan modal $0,086 > 0,05$ dan variabel kinerja pelayanan $0,369 > 0,05$.

4.1.3.3 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang

baik adalah yang terbebas dari masalah multikolinieritas. Hasil pengujian untuk multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-31.537	13.998		-2.253	.026		
	ln_pmpd	1.506	.629	.241	2.392	.018	.822	1.217
	KINERJAPELAYANAN	3.156	4.991	.064	.632	.528	.822	1.217

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS
 Sumber: Hasil Output SPSS (2018)

Berdasarkan tabel 4.7, hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa tingkat *tolerance* pada setiap variabel sebesar 0,822 dan tingkat VIF nya sebesar 1,217 < 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada data yang diuji tidak terjadi multikolinieritas.

4.1.3.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji tentang ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu periode t dengan periode t-1 pada persamaan regresi linear. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Berikut ini adalah hasil perhitungan autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson*:

Tabel 4.8 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.274 ^a	.075	.058	7.35422	2.005

a. Predictors: (Constant), KINERJAPELAYANAN, ln_pmpd

b. Dependent Variable: PROFITABILITAS

Sumber: Hasil Output SPSS (2018)

Du / Dl	DW	4-du	Keterangan
1.71217 / 1.67681	2.005	2.28783	Bebas autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.7, dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada variabel independen yang ditunjukkan dengan $du < DW < 4-du$, yakni $1,71217 < 2,161 < 2,28783$.

4.1.4 Pengujian Hipotesis

4.1.4.1 Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (*model casual*) yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori. Setelah melakukan uji asumsi klasik, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis jalur. Berdasarkan pengelolaan data yang dilakukan dengan menggunakan program SPSS 23, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Profitabilitas

Pada tabel di bawah ini ditunjukkan hasil regresi atas pengaruh penyertaan modal pemerintah daerah terhadap profitabilitas:

Tabel 4.9 Hasil Analisis Regresi Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Profitabilitas

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.268 ^a	.072	.063	7.33449

a. Predictors: (Constant), ln_pmpd

Indah Rachmasari Kurniawan, 2018

PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN KINERJA PELAYANAN
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-32.966	13.778		-2.393	.018
	ln_pmpd	1.674	.569	.268	2.941	.004

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS
 Sumber: Hasil Output SPSS (2018)

Berdasarkan tabel 4.9, dapat diketahui bahwa hasil output SPSS menghasilkan nilai signifikansi variabel penyertaan modal pemerintah daerah pada bagian tabel Coefficients yaitu 0.004 lebih kecil dari 0.05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah berpengaruh terhadap profitabilitas. Besarnya nilai R² atau R Square yang terdapat pada tabel Model Summary adalah sebesar 0.072, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi atau sumbangan pengaruh penyertaan modal pemerintah daerah terhadap profitabilitas adalah sebesar 7% sementara sisanya 93% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian.

b. Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Profitabilitas melalui Kinerja Pelayanan

Pada tabel di bawah ini ditunjukkan hasil regresi atas pengaruh penyertaan modal pemerintah daerah terhadap profitabilitas melalui kinerja pelayanan:

Tabel 4.10 Hasil Analisis Regresi Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Profitabilitas melalui Kinerja Pelayanan

Output SPSS Persamaan Regresi (1)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.422 ^a	.178	.171	.13924

a. Predictors: (Constant), ln_pmpd

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.453	.262		-1.731	.086
	In_pmpd	.053	.011	.422	4.929	.000

a. Dependent Variable: KINERJAPELAYANAN
 Sumber: Hasil Output SPSS (2018)

Ouput SPSS Persamaan Regresi (2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.274 ^a	.075	.058	7.35422

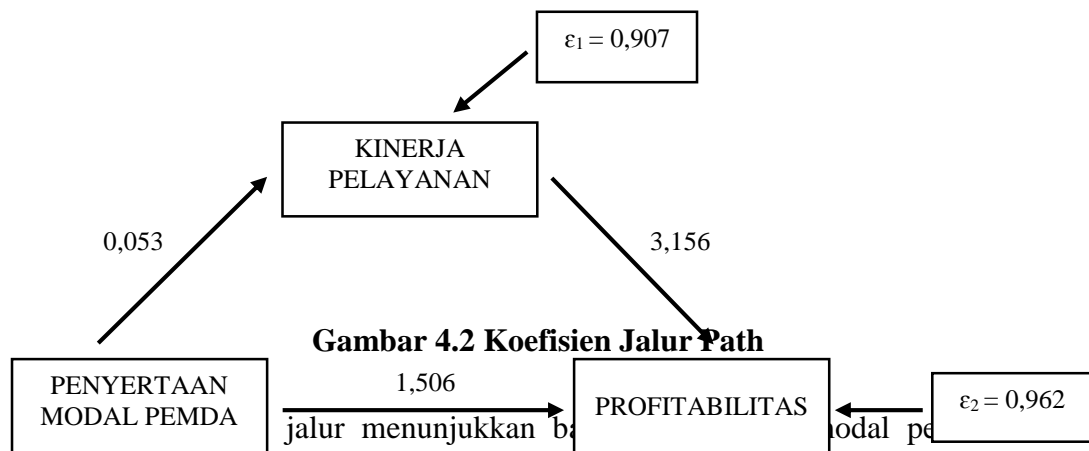
a. Predictors: (Constant), KINERJAPELAYANAN, In_pmpd

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-31.537	13.998		-2.253	.026
	In_pmpd	1.506	.629	.241	2.392	.018
	KINERJAPELAYANAN	3.156	4.991	.064	.632	.528

a. Dependent Variable: PROFITABILITAS
 Sumber: Hasil Output SPSS (2018)

Berdasarkan hasil ouput SPSS pada tabel 4.10, memberikan nilai standardized beta Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) pada persamaan (1) sebesar 0.053 dan signifikan pada 0.000 yang berarti PMPD mempengaruhi Kinerja Pelayanan. Nilai koefisien unstandardized beta 0.053 merupakan nilai path atau jalur p2. Pada ouput SPSS persamaan regresi (2) nilai unstandardized beta untuk PMPD 1.506 dan Kinerja Pelayanan 3.156. Nilai unstandardized beta PMPD 1.506 merupakan nilai jalur path p1 dan nilai unstandardized beta Kinerja Pelayanan 3.156 merupakan nilai jalur path p3. Besarnya nilai $e1 = \sqrt{(1 - 0.178)} = 0.907$ dan besarnya nilai $e2 = \sqrt{(1 - 0.075)} = 0.962$.

Berikut adalah hasil analisis jalur yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.2 Koefisien Jalur Path

daerah dapat berpengaruh langsung ke profitabilitas dan tidak berpengaruh dari penyertaan modal pemerintah daerah ke kinerja pelayanan (sebagai *intervening*) lalu ke profitabilitas. Besarnya pengaruh langsung adalah 1.506, sedangkan untuk mencari pengaruh penyertaan modal pemerintah daerah terhadap profitabilitas melalui kinerja pelayanan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{PTL} &= \text{P2} \times \text{P3} \\
 &= 0,053 \times 3,156 \\
 &= \underline{0,167}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Total pengaruh (korelasi penyertaan modal pemerintah daerah ke profitabilitas)} &= \\
 \text{P1} + (\text{P2} \times \text{P3}) &= 1,506 + (0,053 \times 3,156) \\
 &= \underline{1,673}
 \end{aligned}$$

Keterangan:

- PTL : Pengaruh tidak langsung penyertaan modal pemerintah daerah terhadap Profitabilitas melalui kinerja pelayanan
- P1 : Pengaruh langsung penyertaan modal pemerintah daerah terhadap profitabilitas
- P2 : Koefisien path dari penyertaan modal pemerintah daerah ke kinerja pelayanan
- P3 : Koefisien path dari kinerja pelayanan ke profitabilitas

Berdasarkan analisis di atas, dapat diringkas pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.11 Hasil Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Variabel	Pengaruh Langsung	Variabel Intervening	Pengaruh Tidak Langsung
XZ terhadap Y	0,053	3,156	0,167
X terhadap Y	1.506		Total = 1,673

Sumber: Hasil Perhitungan (2018)

Untuk mengetahui signifikansi pengaruh penyertaan modal pemerintah daerah terhadap profitabilitas melalui kinerja pelayanan, diuji dengan *Sobel Test* sebagai berikut:

Standar error dari koefisien indirect effect (Sp_{2p3})

$$Sp_{2p3} = \sqrt{p_{32}^2 Sp_{22}^2 + p_{22}^2 Sp_{33}^2 + Sp_{22}^2 Sp_{33}^2}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{(3,156)^2 (0,011)^2 + (0,053)^2 (4,991)^2 + (0,011)^2 (4,991)^2}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{(0,0012052007) + (0,0699724175) + (0,0030141198)}$$

$$Sp_{2p3} = \sqrt{0,074191738}$$

$$Sp_{2p3} = 0,272382 = \underline{0,272}$$

Berdasarkan hasil Sp_{2p3} ini kita dapat menghitung nilai t statistik pengaruh mediasi dengan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{p_{2p3}}{Sp_{2p3}} = \frac{0,167}{0,272} = 0,614$$

Oleh karena itu nilai t hitung = 0,614 lebih kecil dari t tabel dengan tingkat signifikansi 0,05 yaitu sebesar 1,98157, maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0,167 yang berarti tidak ada pengaruh mediasi.

4.1.4.2 Uji Hipotesis

Persamaan struktural pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Kinerja Pelayanan} = 0,422\text{PMPD} + e_1 \quad (1)$$

$$\text{Profitabilitas} = 1,506\text{PMPD} + 3,156\text{KinerjaPelayanan} + e_2 \quad (2)$$

1. Hipotesis Satu (H1): Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berpengaruh terhadap Profitabilitas

$H_0 = 0$, penyertaan modal pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

$H_a \neq 0$, penyertaan modal pemerintah daerah berpengaruh terhadap profitabilitas.

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel penyertaan modal pemerintah daerah sebesar $0.000 < 0.05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil tersebut dapat diartikan bahwa variabel penyertaan modal pemerintah daerah berpengaruh terhadap variabel profitabilitas.

2. Hipotesis Dua (H2): Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berpengaruh terhadap Profitabilitas melalui Kinerja Pelayanan

$H_0 = 0$, penyertaan modal pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas melalui kinerja pelayanan.

$H_a \neq 0$, penyertaan modal pemerintah daerah berpengaruh terhadap profitabilitas melalui kinerja pelayanan.

Berdasarkan hasil analisis jalur dan uji *Sobel Test* tampak bahwa nilai t-hitung 0,614 lebih kecil dari t-tabel 1,98157, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Hasil tersebut dapat diartikan terdapat bahwa penyertaan modal pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas melalui kinerja pelayanan.

4.2 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini mengacu kepada rumusan masalah yang telah ditentukan pada awal penelitian. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

Indah Rachmasari Kurniawan, 2018

PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN KINERJA PELAYANAN
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagaimana pengaruh penyertaan modal pemerintah daerah terhadap profitabilitas.
2. Bagaimana pengaruh penyertaan modal pemerintah daerah terhadap profitabilitas melalui kinerja pelayanan.

Setelah dilakukan pengujian hipotesis berdasarkan perhitungan statistika dengan alat bantu *SPSS 23* melalui teknik analisis jalur (*path analysis*), maka penulis dapat menjelaskan analisis data dan uji hipotesis tersebut sebagai berikut:

4.2.1 Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Profitabilitas

Penyertaan modal pemerintah daerah merupakan investasi permanen yaitu investasi yang bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak untuk ditarik kembali, untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (Mutia Rizal, dalam Halim, 2016, hlm. 208).

Penyertaan modal pemerintah daerah ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat undang-undang dimana daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal tersebut dapat ditambah, dikurangi, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Sumber modal BUMD berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya.

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara umum penyertaan modal pemerintah daerah terhadap PDAM yang menjadi sampel dalam penelitian ini nilainya terus meningkat selama tahun 2014 – 2016 dengan peningkatan rata-rata yang cukup signifikan. Sedangkan pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan indikator *Return on Equity* (ROE). Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa secara rata-rata profitabilitas PDAM di Indonesia yang menjadi sampel dalam penelitian ini skornya terus menurun selama tahun 2014 – 2016.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penyertaan modal pemerintah daerah terhadap profitabilitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Indonesia tahun 2014 – 2016. Data yang digunakan diperoleh dari

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
Indah Rachmasari Kurniawan, 2018
**PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN KINERJA PELAYANAN
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***

di Indonesia Tahun 2014 – 2016 dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PDAM Tahun 2017 yang diperoleh dari *website* Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM). Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini berjumlah 114 PDAM. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh antar variabel tersebut, penelitian ini menggunakan analisis jalur (*path analysis*).

Hasil analisis tersebut menghasilkan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang artinya bahwa penyertaan modal pemerintah daerah berpengaruh terhadap profitabilitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Abdul Halim (2014, hlm. 147-148) bahwa PDAM sebagai pusat pertanggung jawaban, dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab untuk memperoleh laba atau profitabilitas dari kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh PDAM. Pertanggung jawaban tersebut dinilai berdasarkan perbandingan antara laba yang dihasilkan dengan investasi yang ditanamkan oleh entitas induknya. PDAM merupakan contoh pusat laba dalam entitas pemerintah daerah. Laporan keuangan yang disusun oleh BUMD salah satunya PDAM merupakan input informasi bagi pemerintah daerah sebagai investor di BUMD tersebut. Laporan ini pula yang dianalisis oleh pemerintah daerah dalam mengambil keputusan investasinya, termasuk apakah pihaknya akan meningkatkan investasinya pada perusahaan daerah tersebut atau tidak.

Hal ini dapat dilihat dari aspek teori keagenan (*agency theory*). Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Pemerintah Daerah sebagai prinsipal mempercayakan pengelolaan kekayaan kepada PDAM sebagai agen. Jadi, dalam konteks teori keagenan tersebut, PDAM harus mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan kekayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan baik. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Mukhlis pada tahun 2001 dengan judul Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terhadap Kinerja PT. Bank Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Selatan yang mana menyimpulkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja (ROE) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan.

Dari hasil seluruh pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian ini dan penelitian sebelumnya, penelitian ini menunjukkan bahwa

Indah Rachmasari Kurniawan, 2018

**PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN KINERJA PELAYANAN
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penyertaan modal pemerintah daerah yang diukur dengan nilai buku penyertaan modal pemerintah daerah berpengaruh terhadap profitabilitas. Artinya semakin naik jumlah penyertaan modal pemerintah daerah terhadap PDAM diprediksikan akan meningkatkan profitabilitas PDAM.

4.2.2 Pengaruh Penyertaan Modal Pemerintah daerah terhadap Profitabilitas melalui Kinerja Pelayanan

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan air minum yang berkualitas bagi masyarakat (*public service*), mendorong pengembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah, dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Agar kinerja PDAM maksimal dalam melayani masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal terhadap PDAM dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan memperoleh laba PDAM. Karena jika kinerja pelayanan yang diberikan oleh PDAM bagus dan berkualitas, maka masyarakat akan merasa puas, dan nantinya akan berimbas kepada pendapatan atau profitabilitas yang di dapatkan oleh PDAM.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Davis (2006) bahwa *service quality* sebagai ukuran seberapa baik pelayanan yang diberikan sesuai dengan harapan pelanggan. Menurut Parida & Baksi (2011) mengungkapkan bahwa *service quality* merupakan penentu utama dari kepuasan pelanggan, yang selanjutnya mempengaruhi referensi pelanggan dan profitabilitas jangka panjang. Selain itu, kualitas pelayanan PDAM sangat penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan, karena kepuasan pelanggan yang diberikan PDAM akan berimbas sangat luas bagi peningkatan keuntungan PDAM. Atau dengan kata lain, apabila pelanggan merasa puas terhadap pembelian produk/jasa PDAM, maka pelanggan tersebut akan loyal, mengulang kembali pembelian produknya, bahkan memberikan promosi gratis dari mulut ke mulut (Kasmir, 2008, hlm. 162).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan atau *service quality* yang semakin baik dilakukan oleh perusahaan antara lain adalah bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan yang berimbas pada pendapatan perusahaan. Tetapi, berdasarkan hasil uji *sobel*, dapat diketahui bahwa

Indah Rachmasari Kurniawan, 2018
PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN KINERJA PELAYANAN
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penyertaan modal pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas melalui kinerja pelayanan. Hasil uji *sobel* t -hitung $<$ t -tabel yakni sebesar $0,614 < 1,98157$. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi penyertaan modal pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas melalui kinerja pelayanan. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti penyertaan modal pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas melalui kinerja pelayanan.

Pada penelitian yang dilakukan Smith and Wright (2004), untuk mengetahui kualitas pelayanan terhadap kinerja keuangan (ROA), memerlukan variabel lain untuk menghubungkan yaitu loyalitas pelanggan. Selain loyalitas pelanggan, variabel lain yang dapat menghubungkan antara penyertaan modal pemda dengan profitabilitas adalah kinerja operasional. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ahmad (2004, dalam Sudarno, dkk, 2010) bahwa semakin banyak penyertaan modal jika digunakan untuk investasi maka akan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah dalam menilai kinerja keuangan, ada banyak point yang harus dipertimbangkan selain ROE.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aminatuzzuhro & Lutfillah, 2014) bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan., dan penelitian yang dilakukan oleh Angga Ronauli L.S (2010) bahwa memaksimalkan kinerja pelayanan masih belum cukup untuk menjamin profitabilitas perusahaan.